



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

## BALAI PEMASYARAKATAN KELASIMAKASSAR





# KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan YME, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Balai Kemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan perwujudan konkrit hasil dari evaluasi pencapaian kinerja Balai Kemasyarakatan Kelas I Makassar selama 1 (satu) Tahun anggaran yang diharapkan mampu menjadi alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, Laporan Kinerja Balai Kemasyarakatan Kelas I Makassar dan Dokumen Penetapan Kinerja disusun guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terpadu. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Balai Kemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2023 ini dapat memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Balai Kemasyarakatan Kelas I Makassar dimasa yang akan datang.

Kepala Balai Kemasyarakatan  
Kelas I Makassar,



Sobiana  
NIP. 198209112000121001

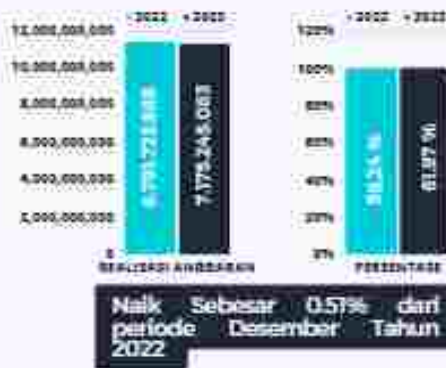
# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
<i>A. Latar Belakang</i>	<b>1</b>
<i>B. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi</i>	<b>2</b>
<i>C. Maksud dan Tujuan</i>	<b>4</b>
<i>D. Aspek Strategis</i>	<b>4</b>
<i>E. Isu Strategis</i>	<b>5</b>
<i>F. Sistematika Laporan</i>	<b>7</b>
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
<i>A. Rencana Strategis</i>	<b>9</b>
<i>B. Perjanjian Kinerja</i>	<b>13</b>
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<i>A. Capaian Kinerja Organisasi</i>	<b>14</b>
<i>B. Realisasi Anggaran</i>	<b>25</b>
<i>C. Capaian Kinerja Anggaran</i>	<b>28</b>
<i>D. Capaian Kinerja Lainnya</i>	<b>30</b>
<b>IV. PENUTUP</b>	
<i>A. Kesimpulan</i>	<b>33</b>
<i>B. Saran</i>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Fungsi Masing-masing Sub Bagian	3
Tabel 1.2 Isu strategis dan Keberhasilan yang berhasil dicapai	5
Tabel. 2.1 Sasaran Strategis	12
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 3.1 Capaian Kinerja	14
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran TA 2023	21
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	25

## REALISASI ANGGARAN



## SMART



## IKPA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester I Tahun 2023 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan pengelolaan administratif dan fasilitatif sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Perencanaan kinerja sebagai Rumusan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2023 yang memuat tentang indikator kinerja (outcome) dan (output) untuk satu Program pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penetapan Kinerja sebagai Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja/sasaran strategis yang diuraikan dalam rumusan indikator kinerja dengan target kinerja dan anggaran pada setiap indikator pada satu program pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Berlandaskan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif, Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar telah berhasil mencapai prestasi serta inovasi penting sampai dengan Semester II tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diatas target Kementerian Hukum dan HAM.
2. Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor berupa Pengadaan Sarana dan Prasarana sebanyak 76 Unit Meja, Kursi dan Pendingin Ruangan
3. Membuat inovasi berupa Aplikasi Gammara (Gabungan Aplikasi Bimbingan Kemasyarakatan) serta Campenna yaitu Layanan Call Center Whatsapp Bapas Kelas I Makassar

Selain Prestasi dan inovasi, juga telah dilakukan langkah-langkah strategis dalam pencapaian kinerja sesuai dengan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Balai pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan hasil pencapaian seperti pada tabel berikut :

# IKHTISAR EKSEKUTIF

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60 Persen	72.01 Persen	120.01 Persen
		Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55 Persen	2.84 Persen	194.84 Persen
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35 Persen	52 Persen	148.57 Persen
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1Layanan	100 %
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	76 Unit	76 Unit	100%

Hasil pencapaian kinerja dan prestasi Balai Masyarakat Kelas I Makassar harus mampu dipertahankan dan dilakukan evaluasi kinerja secara berkesinambungan melalui berbagai perbaikan terhadap organisasi yang dilakukan secara terus menerus.



UNTUK LAYANAN SECARA DARING  
SILAHKAN HUBUNGI VIA  
WHATSAPP BAPAS MAKASSAR

0811 444 6464



**SOMBERE**



*Sopan, Mengayomi, Beradab, Empati*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar berdiri sejak Tahun 1978 adalah sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

Balai pemasyarakatan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Balas Kelas I Makassar merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dimana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya selalu berhubungan dengan aparat Penegak Hukum lainnya, seperti Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Balas sebagai bagian dari Sistem Tata Peradilan dalam pelaksanaan tugas, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, sebagai dampak dari perubahan arus transformasi dan perkembangan politik. Sebagai upaya mengantisipasi timbulnya permasalahan tersebut maka perlu pembenahan diberbagai bidang, baik secara administratif maupun teknis.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dipimpin oleh Kepala Balai Pemasyarakatan dan dibantu oleh 3 Unit Eselon IV yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA)
3. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD)

Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar mencakup 2 (dua) Kota dan 10 (sepuluh) Kabupaten yakni :

1. Kota Makassar
2. Kota Pare-Pare
3. Kab. Selayar
4. Kab. Bulukumba
5. Kab. Bantaeng
6. Kab. Jeneponto
7. Kab. Takalar



8. Kab. Gowa
9. Kab. Maros
10. Kab. Pangkep
11. Kab. Barru
12. Kab. Pinrang

Dengan rincian sebagai berikut Terdapat dua Pos BAPAS yakni :

1. Pos BAPAS Pare-Pare
2. Pos BAPAS Bulukumba

Terdapat 14 Mitra :IPT Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS/Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yakni :

1. Lapas Makassar
2. Rutan Makassar
3. Rutan Selayar
4. Lapas Bulukumba
5. Rutan Bantaeng
6. Rutan Jeneponto
7. Lapas Takalar
8. Lapas Narkotika Sungguminasa
9. Lapas Perempuan Sungguminasa
10. LPKA Maros
11. Lapas Pare-Pare
12. Rutan Barru
13. Rutan Pangkep
14. Rutan Pinrang

Terdapat Mitra Kerja dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dari 12 (dua belas) wilayah kerja mulai Kota Makassar hingga Kab. Pinrang

## **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Tugas**

Balai pemasyarakatan memiliki tugas yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Fungsi**

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan

2. Melakukan registrasi klien masyarakat
3. Melakukan bimbingan masyarakat dan pengentasan anak
4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang dewan Pembina Masyarakat di LP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Struktur Organisasi

Sebagai Unit pelaksana Teknis Eselon III A, Balai Masyarakat Kelas I Makassar mempunyai 3 Pejabat Struktural Eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teknis membawahi petugas teknis, yaitu Pembimbing Masyarakat, selain pelaksanaan tugas teknis juga melaksanakan tugas administrasi/ketatausahaan, yang dikoordinasikan oleh Kepala sub Bagian tata usaha, dimana masing-masing pejabat tersebut dibantu oleh Kepala Sub Seksi dan kepala Urusan, dengan struktur organisasi sebagai berikut.



Adapun fungsi dari masing-masing Sub Bagian, Seksi diatas, secara ringkas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Fungsi Masing-masing Sub Bagian

Sub Bagian/Seksi	Tugas/Fungsi
Sub Bagian Tata Usaha	1. Melakukan urusan kepegawaian 2. Melakukan urusan keuangan

	3. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
<b>Seksi Bimbingan Klien Dewasa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan registrasi</li> <li>2. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Masyarakat dan memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien</li> <li>3. Memberikan bimbingan kerja</li> </ol>
<b>Seksi Bimbingan Klien Anak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan registrasi</li> <li>2. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan dewan pembina masyarakat, serta memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien</li> <li>3. Melaksanakan bimbingan kerja</li> </ol>

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020.

LKIP ini menyajikan pencapaian kinerja Balai Masyarakat Kelas I Makassar selama tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Meskipun Inpres No. 7 Tahun 1999 mengisyaratkan setiap instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun laporan kinerja ini juga merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Selain itu, Laporan Kinerja Balai Masyarakat Kelas I Makassar dan Dokumen Penetapan Kinerja juga disusun guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terpadu.

### D. ASPEK STRATEGIS

Bapas memiliki peran strategis dalam Kementerian Hukum dan HAM. Bapas melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Pembimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak, yaitu memberikan

bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Bapas Kelas I Makassar merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System), dimana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya selalu berhubungan dengan aparat Penegak Hukum lainnya, seperti Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

#### E. ISU STRATEGIS

Tabel 1.2

Isu strategis dan Keberhasilan yang berhasil dicapai Tahun Sebelumnya

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	KEBERHASILAN YANG DICAPAI TAHUN SEBELUMNYA
<b>Sub Bagian Tata Usaha</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prasarana kantor yang tidak seimbang dengan jumlah pegawainya di mana semakin hari semakin bertambah jumlah pegawainya karna banyaknya peminat jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sehingga suasana kerja kurang kondusif.</li> <li>• Sub Bagian Tata Usaha Bapas kekurangan pegawai jabatan fungsional umum.</li> <li>• Masih ada beberapa JFU yang tidak dapat menggunakan komputer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi anggaran sesuai dengan yang diharapkan.</li> <li>• Melakukan pembinaan fisik dan mental pegawai melalui outbond</li> <li>• Evaluasi Kinerja Pegawai dalam bentuk Briefing setiap Bulannya.</li> <li>• Dokumen RKA-KL dan Laporan Pelaksanaan Anggaran</li> <li>• Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai</li> <li>• Kegiatan Operasional Perkantoran seperti Belanja ATK, Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon, internet, Pengiriman Surat Dinas melalui Pos)</li> <li>• Pengadaan Pakaian Dinas</li> <li>• Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Halaman</li> </ul>

SUB.ORGANISASI	PERMASALAHAN	KEBERHASILAN YANG DICAPAI TAHUN SEBELUMNYA
Seksi Bimbingan Klien Dewasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana penunjang bagi Pembimbing Kemasyarakatan belum memadai.</li> <li>• Anggaran Belanja Non operasional Perjalanan dinas terkait penyusunan Litmas bagi Klien Dewasa belum memenuhi banyaknya jumlah permintaan Litmas.</li> </ul>	<p>Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana (Printer, PC/Laptop, Kendaraan Dinas)</li> <li>• Pelaksanaan Pengawasan dan Pembimbingan Klien Asimilasi Rumah</li> <li>• Kerjasama dengan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait Bimbingan Teknik Las dan Bangunan serta kerjasama dengan BLK</li> <li>• Terjalinnnya Kerjasama dengan beberapa Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dalam bentuk MoU.</li> </ul>
Seksi Bimbingan Klien Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasana belum memadai.</li> <li>• Kurangnya Fungsional Umum.</li> <li>• Instansi Mitra (Pengadilan, Kejaksaan, litmas anak, panggilan sidang, Tahap II dan Proses Diversi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercapainya Diversi terhadap klien anak</li> <li>• Terlaksananya Forum <i>Restoratif Justice</i> untuk meningkatkan sinergitas antar instansi mitra dan mengutamakan kepentingan terbaik untuk Anak</li> <li>• Koordinasi dengan mitra kerja seperti Lapas/Rutan, Kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan.</li> </ul>

## F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar Berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Tahun 2023.

**IKHTISAR EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Tahun 2023.

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

#### B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

#### C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

#### D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu Strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

#### F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Visi dan Misi, Rencana Strategis, Indikator Kinerja, dan anggaran Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Tahun 2023.

#### A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

**B. Perjanjian Kinerja**

Sub Bab ini menyajikan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan berdasarkan anggaran yang telah disetujui.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja pada PK.

**B. Realisasi Anggaran**

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan.

**C. Capaian Kinerja Anggaran**

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja yang dihasilkan dari SMART dan IKPA.

**D. Capaian Kinerja Lainnya**

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja yang dihasilkan dari E-Performance, Tarja, E-Monev dan kegiatan Prinas lainnya.

**BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Tahun 2023 serta upaya dan strategi dalam mempercepat pencapaian kinerja pada Tahun 2023.

**A. Simpulan**

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

**B. Saran**

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

#### 1. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

**"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden  
"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**



## 2. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- 1) Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional
- 2) Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas
- 3) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 4) Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
- 5) Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
- 6) Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan
- 7) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

## 3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan 2020, No.1630 -61- tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- 2) Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- 3) Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
- 4) Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
- 5) Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
- 6) Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah 2020, perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
- 7) Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

#### 4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Tabel. 2.1

Sasaran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga
		Persentase merurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan
		Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
		Jumlah layanan perkantoran
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi

## B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja dengan hasil perjanjian sebagai berikut.

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60 Persen
		Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55 Persen
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35 Persen
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	76 Unit
<b>Kegiatan</b>		<b>Anggaran</b>	
Program Pelayanan Dan Penegakan Hukum		Rp. 735.846.000,-	
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah		Rp. 735.846.000,-	
Program Dukungan Manajemen		Rp. 10.841.989.000	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat		Rp. 10.841.989.000	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

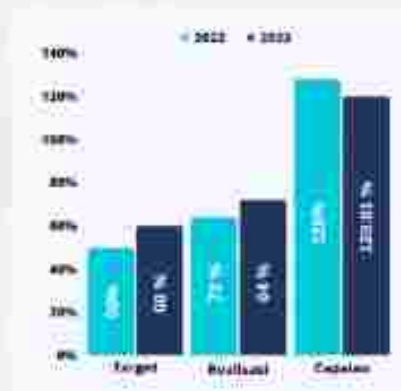
Capaian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pelayanan: pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien: anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga:	60 Persen	72,01 Persen	120,01 Persen
		Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55 Persen	2,84 Persen	194,84 Persen
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35 Persen	52 Persen	148,57 Persen
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100 %
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	76 Unit	76 Unit	100%

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar. Dalam sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja sesuai dengan perjanjian Kinerja Balai masyarakat kelas I Makassar.

a) Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga



Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian target yaitu :

$$\text{Realisasi Target} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

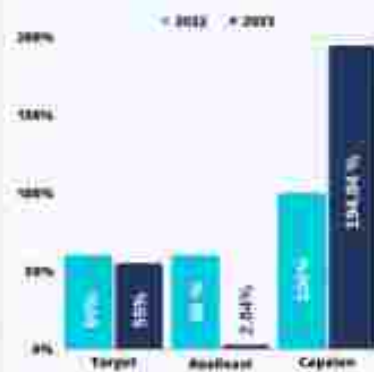
Data Klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga yaitu sebanyak 2206 klien dari total 2998 Klien periode Januari sampai dengan November

2023. Berdasarkan dan dan rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga Tahun 2023 telah melebihi target dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 maupun Rencana strategis UPT Tahun 2020-2024. Adapun rincian tersebut sebagai berikut :

BULAN	Jumlah Klien yang Bekerja	Jumlah Klien usia produktif	Persentase
JANUARI	335	430	77,91%
FEBRUARI	279	367	76,02%
MARET	173	229	75,55%
APRIL	148	203	72,91%
MEI	156	204	76,47%
JUNI	187	281	66,55%
JULI	145	208	69,71%
AGUSTUS	142	197	72,08%
SEPTEMBER	219	293	74,74%
OKTOBER	211	293	72,01%
NOVEMBER	211	293	72,01%

Hal ini dapat terwujud berkat program pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terutama dalam hal bimbingan kemandirian serta Kerjasama dengan Pihak ketiga.

b) Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara



Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian yaitu :

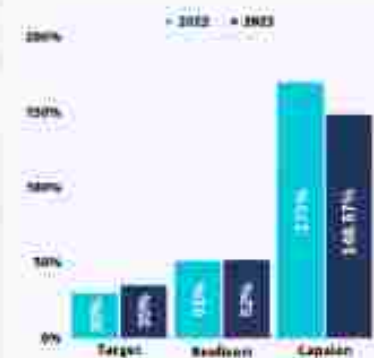
$$\frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \times 100 = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

Makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.

Berdasarkan data yang ada, anak yang mendapatkan putusan pidana penjara yaitu

sebanyak 15 klien dari total 527 pendampingan Klien anak. Sesuai dengan hasil tersebut terjadi peningkatan capaian dengan tahun sebelumnya serta telah memenuhi target yang ada di perjanjian kinerja tahun 2023 serta rencana Strategis UPT tahun 2020-2024. Hal ini dapat tercapai dikarenakan peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan dan penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di persidangan serta dapat memastikan hak-hak anak tersebut terpenuhi.

c) Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya



Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian target yaitu :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil pencapaian sebesar 132,28% atau sangat baik.

Meskipun demikian terjadi penurunan presentasi dari tahun sebelumnya. Hal ini

dikarenakan banyaknya jumlah klien yang ditangani oleh balai pemasyarakatan Kelas I Makassar serta persentase yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian capaian tersebut telah memenuhi target kinerja

serta Rencana strategis UPT Tahun 2020-2024 Balai pemasyarakatan Kelas I Makassar.

2. Sasaran Strategis 2 : **Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.** Dalam sasaran strategis ini terdapat 7 (tujuh) indikator yang harus dicapai dengan persentase pencapaian serta perbandingan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

a) Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT. Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
2022	2023	2022	2023	2022	2023
1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian target yaitu :

Realisasi Target	x	100%	=	Persentase Pencapaian Target
------------------	---	------	---	------------------------------

Berdasarkan hasil realisasi tersebut sampai dengan Tahun 2023 telah diperoleh capaian 100 Persen sehingga telah memenuhi target pada perjanjian kinerja maupun rencana strategis Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan hingga bulan desember Tahun 2023. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Tersusunnya dokumen RKAKL Tahun 2023 dan Workshop Manajemen Risiko, Kegiatan Revisi Anggaran, Kegiatan penyusunan anggaran, Revisi Hal III DIPA TW II dan dalam rangka meningkatkan kinerja indikator deviasi Hal III DIPA, Pengisian kertas kerja jabatan fungsional pengelola keuangan, Tersusunnya revisi anggaran, Pengisian Target-Capaian Output Januari sampai Desember 2023, Penyusunan Dokumen Rencana Optimalisasi Sisa Anggaran Penyusunan Alokasi Anggaran Tahun 2024, Tersusunnya dokumen revisi DIPA terkait belanja pegawai, Revisi POK, Penyusunan Proyeksi Anggaran Tahun 2023 dan Penyusunan Distribument Plant Tahun 2024.



- b) Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
2022	2023	2022	2023	2022	2023
1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian target yaitu :

Realisasi Target	x	100%	=	Persentase Pencapaian Target
------------------	---	------	---	------------------------------

Berdasarkan hasil realisasi tersebut sampai dengan Tahun 2023 telah diperoleh capaian 100 Persen sehingga telah memenuhi target pada perjanjian kinerja maupun rencana strategis Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakannya beberapa kegiatan hingga bulan desember Tahun 2023.

- Januari : Kegiatan Rekonsiliasi Tahun 2022
- Februari : Koordinasi dan Konsultasi terkait penatausahaan dan pengelolaan BMN ke KPPN
- Maret : Melakukan perekaman data BMN, Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna, Melakukan Rekonsiliasi Laporan Bulanan, Melakukan pencatatan persediaan
- April : Penyusunan laporan BMN bulanan, Penyusunan Barang Inventaris,
- Mei : Rekonsiliasi Internal, Eksternal dan Pemrosesan Data BMN Periode Jan sampai Mei 2023
- Juni : Kegiatan rekonsiliasi Laporan Keuangan
- Juli : Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I tahun 2023 beserta data dukungnya.
- Agustus : Kegiatan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Bulan Agustus, Menganalisa daftar Barang BMN berupa pembelian dan transfer masuk, Tersusunnya laporan Barang Persediaan, Tersusunnya Daftar Inventaris Ruang

- September : Kegiatan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Bulan September, Menganalisa daftar Barang BMN berupa pembelian dan transfer masuk, Tersusunnya laporan Barang Persediaan, Tersusunnya Daftar Inventaris Ruang
- Oktober : Penyusunan Laporan Kondisi Barang Rusak Berat dari Aplikasi SAKTI
- November : Pemutakhiran Data Rumah Negara Pada Aplikasi sipBMN, Daduk  
: Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA dan KPPN  
: Periode Semester II Tahun 2023
- Desember : Pemutakhiran Data Rumah Negara Pada Aplikasi sipBMN, Daduk  
: Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA dan KPPN  
: Periode Semester II Tahun 2023

- c) Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
2022	2023	2022	2023	2022	2023
1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian target yaitu :

Realisasi Target	X	100%	-	Persentase Pencapaian Target
------------------	---	------	---	------------------------------

Berdasarkan hasil realisasi tersebut sampai dengan Tahun 2023 telah diperoleh capaian 100 Persen sehingga belum memenuhi target pada perjanjian kinerja maupun rencana strategis Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakannya beberapa kegiatan hingga bulan desember Tahun 2023. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Januari : Workshop Penyelenggaraan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- Februari : Sosialisasi Pelayanan Prima guna peningkatan pelayanan Bapas Makassar
- Maret : Kegiatan GERBANG TRANSISI (Bergerak Bangkitkan Kesadaran Inspirasi dan Motivasi) dalam rangka peningkatan kompetensi

Integritas yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Korupsi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan

- April : Kegiatan Diklat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama
- Mei : Kegiatan Diklat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama
- Juni : Kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi pembimbing kemasyarakatan
- Juli : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023 Pusbanglat KMP LAN Makassar dan Ujian Kompetensi dan Potensi Dalam Rangka Pemetaan Jabatan
- Agustus : Simtek dan Diseminasi Petunjuk Teknis Litmas Sidang Pengadilan terhadap kasus Anak Terorisme, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023-Pusbangdiklat, Pengembangan Kompetensi Human Capital Development Plant bagi Pembimbing Kemasyarakatan
- September : Penilaian Uji Kompetensi Manajerial, Sosialisasi Massive Open Online Course (MOOC) dan Sosial Kultural Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, Sosialisasi Kepmenkumham tentang Pedoman Standar Kompetensi Jabatan, dan Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan Pembayaran Cash Management System(CMS)
- Oktober : Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Angkatan III Tahun 2023 dengan metode Blended Learning dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023 Pusbanglat KMP LAN Makassar
- November : E-Learning Pelatihan Jarak jauh PPSPM dan Bendahara, Pelaksanaan Uji Kompetensi Wawancara Teknis bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan oleh Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan, Pelaksanaan Aktualisasi Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Angkatan III Tahun Anggaran 2023, Kegiatan Akselerasi Digital dalam Wujudkan Pengawasan Optimal,

Desember : E-Learning Pelatihan Jarak jauh PPSPM dan Bendahara, Pelaksanaan Uji Kompetensi Wawancara Teknis bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pelaksanaan Aktualisasi Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Angkatan III Tahun Anggaran 2023, Kegiatan Akselerasi Digital dalam Wujudkan Pengawasan Optimal,

- d) Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
2022	2023	2022	2023	2022	2023
1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian target yaitu :

Realisasi Target	x	100%	=	Persentase Pencapaian Target
------------------	---	------	---	------------------------------

Berdasarkan hasil realisasi tersebut sampai dengan Tahun 2023 telah diperoleh capaian 100 Persen sehingga telah memenuhi target pada perjanjian kinerja maupun rencana strategis Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakan beberapa kegiatan hingga bulan desember Tahun 2023. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Januari : Analisis kebutuhan sarana dan prasarana UPT, Monev perhitungan capaian Perjanjian Kinerja TA-2022 dan Evaluasi RUP  
 Februari : Evaluasi Standar Layanan dan Standar Operasional Prosedur, Workshop SPIP  
 Maret : Workshop Implementasi IKPA Tahun 2023  
 April : Penyusunan Laporan Keuangan, Monitoring IKPA TW I

- Mei : Kegiatan pembinaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan
- Juni : Tersusunnya Laporan keuangan
- Juli : Kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2023, Tersusunnya Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2023
- Agustus : Tersusunnya Laporan realisasi anggaran, Tersusunnya Buku kas Umum, LPJ, Laporan Realisasi, Laporan PNPB,
- September : Laporan Realisasi Uang Lembur, Tersusunnya Data Kontrak Modal Tahun 2023, Tersusunnya Data Sewa Kendaraan, Tersusunnya Laporan realisasi anggaran, Tersusunnya Buku kas Umum, dan LPJ.
- Oktober : Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Kemenkumham TW III Tahun 2023, Rekonsiliasi Rekening Pemerintah TW III Tahun 2023, Pemenuhan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi Tahap III pada SAKTI, Audit Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI
- November : LPJ Perbendaharaan, Pembayaran perjalan Dinas Pegawai, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban, Merekam P3DN atas transaksi SPP/SPM
- Desember : LPJ Perbendaharaan, Pembayaran perjalan Dinas Pegawai, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban, Merekam P3DN atas transaksi SPP/SPM

e) Jumlah Layanan Perkantoran dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
2022	2023	2022	2023	2022	2023
1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian target yaitu :

<b>Realisasi Target</b>	<b>X</b>	<b>100%</b>	<b>=</b>	<b>Persentase Pencapaian Target</b>
-------------------------	----------	-------------	----------	-------------------------------------

Berdasarkan hasil realisasi tersebut sampai dengan Tahun 2023 telah diperoleh capaian 100 Persen sehingga telah memenuhi target pada perjanjian kinerja maupun rencana strategis Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakan beberapa kegiatan hingga bulan desember Tahun 2023. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

- Januari : Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Langganan Daya dan Jasa, Honor Pengamanan Kantor dan petugas kebersihan, Honor Operasional Satuan Kerja, Penanganan dan Pencegahan Covid-19
- Februari : Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pembayaran langganan daya dan Jasa seperti air, listrik, Internet, Honor Operasional perkantoran.
- Maret : Pemeliharaan Peralatan Perkantoran, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Langganan Daya dan Jasa, Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
- April : Pembayaran Gaji dan Tunjangan, pembayaran tunjangan hari raya tahun 2023, pembayaran Langganan Daya dan Jasa, Honor Pengamanan Kantor dan petugas kebersihan, Honor Operasional Satuan Kerja
- Mai : Pemeliharaan Peralatan Perkantoran, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Langganan Daya dan Jasa, Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
- Juni : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta biaya operasional perkantoran
- Juli : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta biaya operasional perkantoran
- Agustus : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran
- September : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran
- Oktober : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran

November : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran seperti pemeliharaan perlatan perkantoran, Pemeliharaan Kendaraan, Langganan Daya dan Jasa, Konsultasi dan Koordinasi

Desember : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran seperti pembayaran honor operasional satuan kerja

- f) Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
2022	2023	2022	2023	2022	2023
2 Unit	76 Unit	2 Unit	76 Unit	100%	100%

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian target yaitu :

<b>Realisasi Target</b>	<b>X</b>	<b>100%</b>	<b>=</b>	<b>Persentase Pencapaian Target</b>
-------------------------	----------	-------------	----------	-------------------------------------

Berdasarkan hasil realisasi tersebut sampai dengan Tahun 2023 telah diperoleh capaian 100 Persen sehingga telah memenuhi target pada perjanjian kinerja maupun rencana strategis Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan telah dilakukan perencanaan terkait pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sehingga dapat terlaksana di awal Tahun 2023. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa Pengadaan Meja kerja Kayu 54 paket, pengadaan 8 Unit set ac split, 1 Set Microphone, 2 Unit Meja Rapat 60 x 180, 4 Unit Meja Rapat 60 x 120, 1 Unit AC Split 1/2 PK, 1 Unit AC Split 1 PK, 4 Unit AC Split 2 PK, 1 Unit Camera Digital, 1 Unit Sice, 1 Unit Scanner Portable, 3 Unit Kursi Besi Metal dan 2 Unit Lemari Besi.

## B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun Anggaran 2023 dan perbandingannya dengan tahun secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Periode TA 2023 dan Perbandingannya dengan Periode TA 2022

URAIAN	PERIODE 2022			PERIODE 2023			PERBANDIN GAN
	PAGU	REALISASI	%	Periode Ini	REALISASI	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>11.465.010.000</b>	<b>11.424.716.950</b>	<b>99,65%</b>	<b>11.290.615.000</b>	<b>11.308.636.534</b>	<b>100,16 %</b>	<b>0,31%</b>
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.470.721.000	1.469.103.189	99,89%	735.846.000	735.771.946	99,99 %	0,10%
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1.470.721.000	1.469.103.189	99,89%	735.846.000	735.771.946	99,99 %	0,10%
BAH Pelayanan Publik Lainnya	3.040.000	4.969.000	98,30%	6.480.000	6.478.948	99,98 %	1,59%
BAH.002 Tim Pengawal Pemasyarakatan	3.040.000	4.959.000	96,39%	6.480.000	6.478.948	99,98 %	1,59%
BAH.002.010 Tim Pengawal Pemasyarakatan	3.040.000	4.959.000	96,39%	6.480.000	6.478.948	99,98 %	1,59%
BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	1.469.581.000	1.464.144.189	99,90%	729.388.000	729.253.000	99,99 %	0,09%
BDC.D03 Bimbingan Keresiyahhalaan	63.236.000	64.900.000	99,63%	71.868.000	71.868.000	100,00 %	0,37%
BDC.D03.001 Bimbingan Keresiyahhalaan	63.236.000	64.900.000	99,78%	71.868.000	71.868.000	100,00 %	0,22%
BDC.D03.001.001 Bimbingan Keresiyahhalaan	11.564.000	11.200.000	96,94%	16.558.000	16.558.000	100,00 %	1,00%
BDC.U01 Pendampingan Peradilan Anak	398.700.000	398.324.820	99,91%	232.640.000	232.626.500	99,99 %	0,09%
BDC.U01.001 Penyelesaian Litigasi Anak	217.058.000	217.798.000	99,93%	98.240.000	98.239.500	99,99 %	0,08%
BDC.U01.001.001 Pelaksanaan pengadilan Anak ( persidangan anak, sidang, peninjauan kembali, peradilan, peninjauan putusan pengadilan persidangan dan peninjauan kembali anak)	163.158.000	164.588.000	99,90%	148.508.000	148.503.000	100,00 %	0,10%
BDC.U01.001.001.001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	53.900.000	53.210.000	99,66%	58.732.000	58.730.000	99,99 %	0,31%
BDC.U02 Fondasi dan Pengembangan	603.120.000	602.919.563	99,98%	312.550.000	312.494.500	99,99 %	0,01%
BDC.U02.001 Penyelesaian Litigasi Peradilan	494.000.000	494.714.000	99,97%	82.250.000	82.248.000	100,00 %	0,03%
BDC.U02.002 Pelaksanaan Pembinaan	298.350.000	298.000.000	99,96%	230.300.000	230.200.000	99,96 %	0,08%
BDC.U02.002.001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	11.418.000	11.400.000	99,96%	10.900.000	10.890.000	99,98 %	0,00%



EDC.003	Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayan	187.000.000	187.779.000	99,99%	111.510.000	111.506.000	100,00 %	0,01%
001	Penyusunan Kitab Rekomendasi Program Pendidikan/Pendidikan	183.750.000	183.729.000	99,99%	91.152.000	91.153.000	100,00 %	0,01%
002	Penyusunan dan Pelaksanaan Program Pelayanan dan Pemasaran Jaban TNP Raba/Lapas/LPADS/LPCA	1.250.000	1.200.000	100,00%	6.890.000	6.850.000	100,00 %	0,00%
003	Mobilisasi, Evaluasi dan Feedback	2.250.000	2.280.000	100,00%	11.000.000	11.500.000	99,99 %	-0,02%
WA	Program Dukungan Manajemen	9.994.289.000	9.867.780.761	98,73%	10.554.769.000	10.572.864.586	100,17 %	1,44%
WA.0231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	9.994.289.000	9.867.780.761	98,73%	10.554.769.000	10.572.864.586	100,17 %	1,44%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.777.959.000	9.651.820.714	98,71%	10.070.339.000	10.088.494.059	100,18 %	1,47%
EBA.000	Layanan BMN	6.190.000	6.180.000	99,84%	5.590.000	5.549.000	99,27 %	-0,57%
001	Perencanaan dan Pelaksanaan BMN	4.390.000	4.380.000	99,77%	4.200.000	4.346.000	99,01 %	-0,71%
002	Absentisme Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000	1.800.000	100,00%	1.200.000	1.200.000	100,00 %	0,00%
EBA.009	Layanan Hubungan Masyarakat	4.300.000	4.300.000	100,00%	4.000.000	4.290.000	99,84 %	-0,16%
001	Pengadaan Informasi Publik	900.000	900.000	100,00%	900.000	900.000	100,00 %	0,00%
002	Kecy Sama	3.400.000	3.400.000	100,00%	3.400.000	3.390.000	99,71 %	-0,21%
EBA.062	Layanan Umum	13.180.000	13.180.000	100,00%	9.960.000	9.940.000	99,80 %	-0,40%
001	Unsur Umum	5.900.000	5.900.000	100,00%	3.390.000	3.700.000	98,50 %	-1,07%
002	Penelitian Kerja New Normal	7.080.000	7.080.000	100,00%	6.240.000	6.240.000	100,00 %	0,00%
EBA.004	Layanan Perencanaan	9.734.289.000	9.715.993.714	99,61%	10.050.480.000	10.068.772.059	100,18 %	0,57%
001	001 dan Turun	8.980.405.000	8.943.071.204	99,59%	9.314.162.000	9.335.160.614	100,26 %	0,61%
002	Operasional dan Perencanaan Kantor	773.884.000	772.410.410	99,81%	734.294.000	732.591.448	99,99 %	0,09%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100.000.000	99.947.000	99,95%	567.000.000	567.486.000	100,00 %	0,00%

EBC.001	Layanan Sarana Internal	100.000.000	99.947.000	99,95%	367.500.000	367.485.000	100,00 %	0,05%
001	Peningkatan Perangkat Dalem dan Kinerjanya	22.000.000	21.990.000	99,96%	387.500.000	387.480.000	100,00 %	0,04%
EBC.004	Layanan Manajemen SDM Internal	76.160.000	76.099.000	99,92%	77.420.000	77.420.000	100,00 %	0,08%
002	Administrasi Kepegawaian	76.160.000	76.099.000	99,92%	77.420.000	77.420.000	100,00 %	0,08%
EBC.005	Layanan Manajemen Kinerja Internal	40.170.000	39.813.447	99,36%	39.510.000	39.465.527	99,89 %	0,53%
EBC.007	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.500.000	1.499.000	99,93%	1.500.000	1.489.000	99,27 %	-0,67%
001	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	1.500.000	1.499.000	99,93%	1.500.000	1.489.000	99,27 %	-0,67%
EBC.003	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.300.000	3.278.000	99,27%	4.800.000	4.784.000	99,67 %	0,36%
001	Penyusunan Laporan Kinerja	3.300.000	3.278.000	99,27%	4.800.000	4.784.000	99,67 %	0,36%
EBC.008	Layanan Manajemen Keuangan	10.260.000	10.080.000	98,34%	8.100.000	8.100.000	100,00 %	1,66%
001	Penjajahan keuangan dan keabsahabataan	10.260.000	10.080.000	98,34%	8.100.000	8.100.000	100,00 %	1,66%
EBC.001	Layanan Reformasi Kinerja	25.110.000	25.048.447	99,75%	25.110.000	25.092.527	99,83 %	0,18%
001	Penilaian dan Reformasi Kinerja (Peningkatan Efesi dan Efektivitas)	25.110.000	25.048.447	99,75%	25.110.000	25.092.527	99,83 %	0,18%

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penyerapan realisasi anggaran sampai dengan periode Desember Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebanyak 0,51 Persen yakni dari 99,65-Persen pada periode Desember TA 2022 menjadi 100,16 Persen pada periode Desember TA 2023:

## C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

### 1. Aplikasi SMART

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat)

Variabel yaitu :

1. Capaian Keluaran dengan bobot 43,5 %
2. Penyerapan Anggaran dengan bobot 28,6%
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%
4. Konsistensi Penyerapan anggaran terhadap perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir dengan bobot 9,7%

Berdasarkan penilaian tersebut sampai dengan periode bulan november diperoleh nilai SMART 85.62 dengan rincian sebagai berikut :



## 2. Aplikasi IKPA

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 8 (Delapan) Variabel yaitu :

<input type="radio"/> Revisi DIPA, bobot 10%	<input type="radio"/> Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
<input type="radio"/> Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%	<input type="radio"/> Dispensasi SPM, bobot 10%;
<input type="radio"/> Data Kontrak, bobot 10%;	<input type="radio"/> Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
<input type="radio"/> Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;	<input type="radio"/> Capaian Output, bobot 25%

Berdasarkan penilaian yang dilakukan diperoleh Nilai 96,64 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3

### Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sampai Dengan : NCPN.MB03

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	136	013	407072	BALAI PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	Nilai	100,00	92,90	89,82	100,00	100,00	94,13	100,00	100,00	96,64	100%	96,64
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	9,29	17,96	10,00	10,00	9,41	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	95,00		96,79					100,00			

## D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

### 1. Aplikasi E-Performance

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja

Kategori	Tahun	Tahun Target	Tahun Realisasi					Tahun	Kategori	Status
			2014	2015	2016	2017	2018			
Kategori 1	2014	2014								
	2015	2015								
	2016	2016			!					!
	2017	2017								
	2018	2018								
Kategori 2	2014	2014								
	2015	2015								
	2016	2016								
	2017	2017								
	2018	2018								

### 2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tidak dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis hanya sampai level Kantor Wilayah.



### 3. e-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Telah dilakukan pelaporan sampai dengan periode November 2023 dan akan terus dilaksanakan pelaporan secara berkala.



#### 4. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Capaian yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program Prioritas Nasional yang dilakukan oleh Unit Eselon I atau Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tidak terdapat kegiatan prioritas Nasional dalam tingkat unit pelaksana teknis.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2020-2024.

Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan pada Balai Pemasarakatan. Secara umum, pencapaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM pada kantor Bapas Kelas I Makassar terutama Fungsional Umum;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasarakatan;
3. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan;
4. Tidak tersedianya biaya operasional untuk Pos Bapas Makassar yaitu Pos Bapas Bulukumba dan Pos Bapas Pare-Pare;



5. Instansi Mitra (Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian) belum tertib administrasi terkait permintaan litmas anak, panggilan sidang, Tahap II dan Proses Diversi.

## **B. SARAN**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemenuhan SDM pada kantor Bapas Kelas I Makassar terutama Fungsional Umum;
2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
3. Peningkatan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
4. Dengan terbentuknya Pos Bapas yakni Pos Bapas Pare-Pare dan Pos Bapas Bulukumba menambah beban tugas Balai pemasyarakatan Kelas I Makassar sebagai induk, kiranya belanja perjalanan dinas dalam kota dan Penyusunan Penelitian kemasyarakatan ditingkatkan;
5. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.



# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sopiana  
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Liberti Silirjak  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Selaku stasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 18 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

  
Liberti Silirjak  
NIP. 196407011991031001

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I  
Makassar

  
Sopiana  
NIP. 198209112000121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR DENGAN KEPALA KANTOR**  
**WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Saker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	75 Unit

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 735.846.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 735.846.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 10.841.989.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 10.841.989.000,-

Makassar, 18 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Liberty Sitinjak  
NIP. 198407011991031001

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I  
Makassar



Sopiana  
NIP. 198209112000121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sopiana

Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Makassar, 18 Januari 2023

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I  
Makassar

Sopiana  
NIP. 198209112000121001



# AGEN PERUBAHAN



**M FIRDAUS**

PROYEK PERUBAHAN : **GAMMARA**

**BerAKHLAK**  
BERAKHLAK BERAKHLAK BERAKHLAK

**BERAKHLAK**  
158.077

**REFORMASI**  
REKREASI

**PEMAJUAN**  
MUDA BERAKHLAK



MELAYAN BEKERJA NANTI  
TANPA MENGANGGUR

# GAMMARA

GABUNGAN APLIKASI BIMBINGAN  
KEMASYARAKATAN  
BAPAS KELAS I MAKASSAR



DATABASE  
LITMAS



DATABASE  
PENGAMPIKAN



DATABASE  
PEMBIMBINGAN



KLIEN BEBAS  
HARI INI



PENCALAN  
SPRINT



UNDUH  
SPRINT



PENGECEKAN



DATABASE  
KLIEN WAJIB  
LAPOR



DAFTAR  
SIDANG TPP



KLIEN  
TERDAFTAR TPP



ARSIP  
LAPORAN TPP



KEHADIRAN  
TPP



DAFTAR  
PENCAHUTAN



DATABASE  
PENCAHUTAN



REKAP  
PENCAHUTAN



DAFTAR  
RUMAH EKAM



SETOR ARSIP



BANK ARSIP



PERFORMA  
PK



KEPEGAWAIAN





# AGEN PERUBAHAN



**ANDI IMAM WAHYUDI**  
PROYEK PERUBAHAN : GAMPANNA

**BerAKHLAK**  
BERAKHLAK BERKUALITAS

**SEMANGAT**  
PUSAT 1277

**INFORMASI**  
KELESTARIAN

**PEMAJUAN**  
KEMAJUAN



UNTUK LAYANAN SECARA DARING  
SILAHKAN HUBUNGI VIA  
WHATSAPP BAPAS MAKASSAR

0811 444 6464



SOMBERE



Saran Alternatif Berbasis E-Insight



## OPTIMALISASI LAYANAN

*Kampung Ray Dapas Partisipatif*



Maksud kegiatan tiada lain untuk membentuk komposisi tim  
Pencanangan Zona Integritas di Bapas Makassar yang ideal.



## ATENSI PIMPINAN

*Kondisi Terkini Bapas Kelas I Makassar*  
16 Februari 2023



**KONDISI TERKINI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**  
Cuaca ekstrem yang melanda Bapas Kelas I Makassar dalam beberapa hari terakhir  
membuat loyangan untuk sementara waktu terhambat. Faktornya adalah kondisi  
genangan air yang terdapat di sekitar bangunan.



## STUDI TIRU

*di Bapas Surabaya*

16 Februari 2023



Bapas Kelas I Makassar menggelar studi tiru ke Bapas Kelas I Surabaya dalam rangka optimalisasi pencanangan Zona Integritas.



## OPTIMALISASI LAYANAN

*Sosialisasi Pelayanan Prima*

23 Februari 2023



Bapas Kelas I Makassar menggandeng BRI KCP Slamet Riyadi dalam pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Prima. Pada kegiatan tersebut, fasilitator dari BRI menguraikan sejumlah materi, di antaranya Excellent Service dan Layanan Handling Complaint.



## BIMBINGAN KLIEN

*Pelatihan Kemandirian*

1 - 2 Maret 2023



Bapas Kelas I Makassar mengajak BBPVP Makassar adakan bimbingan kemandirian Klien Pemasyarakatan. Sebanyak 22 Klien mengikuti pelatihan meubelair yang disampaikan langsung oleh Instruktur profesional.



## FAMILY GATHERING

*Games & Gathering*

16 Maret 2023



Bapas Kelas I Makassar menggandeng MSI Training Center dalam kegiatan Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin bagi seluruh pegawai. Kegiatan dilaksanakan di Pantai Oleson Kabupaten Takalar dan berisi sejumlah permainan positif serta penguatan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan.



## PENERIMAAN CSR

*Bantuan dari bank BRI*

3 April 2023



Kepala Bapas Kelas I Makassar terima bantuan CSR dari BRI KCP Slamet Riyadi. Bantuan yang diterima berupa fasilitas kursi tunggu pengunjung, kursi ruang rapat, dan sejumlah air conditioner untuk meningkatkan kualitas layanan kantor.



## UPACARA PERINGATAN

*Hari Kebangkitan Nasional*

22 Mei 2023



Pegawai Bapas mengikuti Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di halaman Kantor Bapas Makassar, Senin 22 Mei 2023



## UPACARA PERINGATAN

*Hari Lahir Pancasila*

1 JUNI 2023



Pegawai Bapas mengikuti Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Bapas Makassar, Kamis 1 Juni 2023



## PUBLIC CAMPAIGN

*Pengendalian Gratifikasi*

14 JUNI 2023



Petugas Bapas Kelas I Makassar Melaksanakan Public Campaign Pengendalian Gratifikasi, Bapas Makassar Kunjungi Rutan Kelas Kelas I Makassar



COFFEE MORNING BAPAS  
MAKASSAR, SOMPANA : EVALUASI  
BERSAMA, KEBAIKAN BERSAMA



KUNJUNGI BAPAS MAKASSAR,  
INSPEKTUR WILAYAH I TAKJUB  
DENGAN INOVASI BAPAS-  
MAKASSAR



KUNJUNGI BAPAS MAKASSAR,  
KADIVPAS SULSEL APRESIASI  
APLIKASI GAMMARA



Belajar **Pemasynrakatan**  
dari Serial Gadis Kretek

